

## **BAB III**

### **KETERLIBATAN RUSIA DALAM KONFLIK SURIAH**

Bab ini menjelaskan tentang penyebab-penyebab konflik hingga pecahnya konflik internal di Suriah, respon internasional terhadap konflik tersebut, serta bantuan militer Rusia untuk mendukung rezim Al-Assad.

#### **A. Konflik Suriah**

Pada dasarnya, kawasan Timur Tengah merupakan kawasan shatterbelt. Shatterbelt merupakan kawasan geografis dengan dua kondisi yaitu, negara dimana didalamnya banyak terjadi konflik lokal dengan atau antara negara-negara kawasan tersebut, dan terdapat keterlibatan beberapa aktor major power yang berasal dari luar kawasan tersebut.<sup>1</sup>

Pemerintahan otoriter telah memunculkan revolusi di Afrika Utara dan Timur tengah. Sama seperti Tunisia dan Mesir, Suriah diperintah oleh rezim satu partai dengan tangan besi selama bertahun-tahun dari zaman Hafez al-Assad dan digantikan oleh anaknya Bashar al-Assad.<sup>2</sup>

#### **1. Latar Belakang Konflik Suriah**

Selama berkuasa, Hafez Al-Assad berusaha melindungi diri dengan memerintah rakyatnya dengan keras dan berusaha mempertahankan rezim tersebut dengan menguasai militer. Keluarga al-Assad berasal dari etnis

---

<sup>1</sup> Paul R. Hensel & Paul F. Diehl, *Loc. Cit.*

<sup>2</sup> Trias Kuncahyono, *Op. Cit.*, hal. 77

minoritas Alawite, tetapi kaum Alawite menguasai militer Suriah secara menyeluruh, mulai dari atas hingga bawah. Alawite juga dapat mengendalikan para komandan Divisi Kedua yang sebagian besar adalah Sunni. Dari 200.000 tentara karier Suriah adalah Alawite. Dan dipimpin oleh saudara-saudara keluarga al-Assad. Di bawah rezim Bashar al-Assad pertumbuhan penduduk menurun drastis sehingga menimbulkan banyak masalah di negara tersebut. Rakyat menilai bahwa nampaknya kemakmuran hanya dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di Damaskus dan Aleppo, akan tetapi desa-desa di Suriah penduduknya sangatlah miskin, dan anak-anak juga tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah. Hal ini mengundang banyak protes dari rakyat Suriah.

Konflik yang terjadi di Suriah berawal dari adanya keinginan warga Suriah untuk membentuk negara Suriah yang lebih demokratis. Awal mula konflik ini merupakan konflik internal antara pemerintah Bashar Al Assad kedua dengan pihak oposisi yang dimotori oleh Dewan Nasional Suriah/SNC. Konflik ini merupakan rembetan dari banyaknya konflik di beberapa negara di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah Arab Spring.<sup>3</sup> Arab Spring merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pemberontakan seperti demonstrasi, protes, dan konflik bersenjata. Pemberontakan tersebut dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah lokal yang dinilai diktator, monarki-absolut, dan melakukan

---

<sup>3</sup> <http://politik.kompasiana.com/2013/04/26/konflik-suriyah-dalam-tinjauan-keamanan-internasional-suatu-kajian-wacana-posmodernisme-554693.html>. Diakses pada 25 Februari 2015

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada rakyatnya sendiri.<sup>4</sup> Arab Spring adalah gerakan revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di negara-negara Arab sejak 18 Desember 2010. Protes ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Skype, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran Internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa ditanggapi keras oleh pihak berwajib, serta milisi dan pengunjuk rasa pro-pemerintah.

Warga Suriah menginginkan berakhirnya pemerintahan rezim Assad yang telah berkuasa sejak tahun 1962. Selama masa pemerintahannya, Hafez Al Assad memimpin dengan sistem diktator dan cenderung menggunakan tindakan kekerasan untuk menghilangkan segala bentuk ancaman yang dapat mengancam posisinya dalam pemerintahan Suriah. Secara politik ada pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat warga negara Suriah terhadap pemerintahan yang berkuasa. Pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat tersebut terdapat pada Emergency Law.

Selama masa kepemimpinan Hafez Al Assad, memberlakukan Emergency Law atau undang-undang darurat. Pada 2 Desember 1962 pemerintah Suriah dibawah kepemimpinan presiden Hafez Al Assad membuat sebuah Emergency Law. Undang-undang ini merupakan sebuah aturan yang memberikan pembatasan terhadap publikasi, menghalangi atau

---

<sup>4</sup> Alexander Cockburn, 2011, *The Tweets And Revolutions*, Counter Punch Diaries, edisi 18-20 Februari 2011

mencegah bentuk komunikasi masyarakat dalam bentuk surat, mencegah pertemuan publik, dan menangkap individu-individu yang berusaha untuk mengancam keamanan negara dan keterlibatan umum dalam pemerintahan Suriah. Setiap individu yang melakukan pelanggaran akan diadili dan mendapatkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan militer yang terdapat dalam Emergency Law.<sup>5</sup>

Ketika partai Baath pertama kali merebut kekuasaan, pada 8 Maret 1963 partai ini membentuk sebuah dewan nasional yaitu National Revolutionary Comand Council (NDCC) atau dewan perintah revolusioner nasional. Dewan ini bertugas untuk membantu pemerintahan dibawah presiden Assad pertama. Setelah dewan ini resmi dibentuk kemudian NDCC mulai diberlakukan meskipun undang-undang tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari para menteri dan parlemen Suriah, padahal semestinya undang-undang tersebut hanya diberlakukan ketika terjadi peperangan atau stabilitas nasional Suriah tidak stabil. Tetapi partai Baath tetap bersikeras untuk meratifikasi NDCC untuk mencegah berkembangnya pemahaman nasionalis Arab dan sosialisme di Suriah.

Presiden Hafez Al Assad memimpin hingga tahun 2000. Berakhirnya kepemimpinan Hafez bukan berarti berakhirnya kepemimpinan rezim Assad. Pada tanggal 3 Juni 2000 presiden Bhasar Al Assad menggantikan posisi Hafez Al Assad sebagai pemimpin regional partai Baath, dan pada 11 Juni 2000 parlemen Suriah menyatakan secara resmi bahwa Bhasar merupakan

---

<sup>5</sup> [http://www.sabda.org/misi/pemetaan-negara-doa-1?quicktabs\\_2=1](http://www.sabda.org/misi/pemetaan-negara-doa-1?quicktabs_2=1). Diakses pada 28 Februari 2015

calon kandidat presiden yang didukung oleh partai tersebut. Keputusan ini kemudian diratifikasi oleh parlemen Suriah pada 27 Juni 2000. Dalam sebuah pemilihan umum yang diadakan pada 10 Juli 2000 Bhasar AL Assad memenangkan sekitar 97% suara dalam pemilihan tersebut dan menetapkan Bhasar Al Assad sebagai presiden Suriah menggantikan posisi Hafez Al Assad.

Pemerintahan Bhasar Al Assad tidak memiliki legitimasi yang kuat seperti presiden sebelumnya. Karena banyak pihak yang melakukan aksi protes dan banyaknya pejabat negara yang membelot dan memihak pada kelompok oposisi dan kelompok ekstrimis yang menginginkan berakhirnya rezim pemerintahan Al Assad di Suriah. Sebelum diadakan pemilihan umum presiden Bhasar berjanji kepada warga Suriah bahwa sistem kepemimpinan Suriah tidak akan mempersulit warga Suriah sendiri, dan presiden Bhasar Al Assad berjanji akan memimpin lebih demokratis daripada pemimpin sebelumnya. Namun pada 8 Februari 2001 presiden Bhasar kembali menyatakan adanya pembatasan berpendapat yang boleh dilakukan oleh pemerintah Suriah. Pembatasan ini menimbulkan suatu pergerakan reformasi yang dilakukan oleh warga Suriah. Banyak terjadi demonstrasi di Suriah yang mengakibatkan lemahnya pasar perdagangan negara tersebut. Karena banyaknya aksi demonstrasi pada 8 Oktober 2001 pemerintah Suriah melakukan penahanan terhadap dua anggota masyarakat yang melakukan aksi pemberontakan berdasarkan ketentuan dalam Emergency Law.

Pada 9 Maret 2004 warga Suriah kembali melakukan demonstrasi di kota Damaskus yang menuntut adanya reformasi politik dalam pemerintahan Suriah. Berikutnya pada tanggal 12 Maret kembali terjadi protes yang dilakukan oleh kelompok Kurdish kepada pemerintah dengan tuntutan yang sama. Warga Suriah kembali melakukan demonstrasi pada 16 Oktober yang menuntut penghapusan Emergency Law. Akan tetapi, pemerintah Suriah tidak menanggapi permintaan untuk penghapusan Emergency Law. Namun, pada Februari 2006 Bashar merubah susunan kabinet dalam parlemen Suriah dari sekitar 34 anggota parlemen, 15 diantara merupakan perwakilan baru yang dipilih diluar dari anggota partai Baath. Tetapi tindakan tersebut tidak menyurutkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Suriah. Demonstrasi yang dilakukan oleh warga Suriah semakin besar dengan melibatkan massa yang semakin banyak terlebih karena adanya peristiwa Arab Spring di sebagian besar negara-negara di kawasan Timur Tengah.

## **2. Kronologi Konflik Suriah**

Konflik internal Suriah merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah Suriah dengan warga Suriah yang berkembang menjadi perang saudara semenjak konflik tersebut mendapatkan dukungan dari pihak oposisi yang juga menginginkan berakhirnya rezim pemerintahan Bashar Al Assad yang telah memerintah lebih dari empat dekade terakhir. Konflik ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan warga Suriah, konflik ini juga melibatkan beberapa negara yang mengintervensi dimana negara-negara tersebut mendukung kedua belah pihak yaitu pihak oposisi dan pemerintah Suriah.

Pada minggu pertama bulan Maret, tanggal 6 Maret 2011 di sebuah sekolah di Deraa. Lima belas anak sekolah yang kesemuanya laki-laki berusia antara 10-15 tahun membuat coretan di dinding sekolah. Ke 15 remaja tersebut menuliskan slogan revolusi yang diteriakkan oleh rakyat di Tunisia, Mesir, dan juga Libya “As-Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam!” yang artinya “Rakyat/ingin/menumbangkan rezim!” Slogan revolusi yang pernah dilihat dan dibaca di televisi yang menyiarkan revolusi di Tunisia, Mesir, dan Libya pada dinding sekolah.<sup>6</sup>

Aksi anak-anak tersebut membuat Mukhabarat yang adalah salah satu dinas intelejen atau keamanan yang mengontrol, mengawasi penduduk dan bertugas mempertahankan rezim marah. Mukhabarat pun menyuruh agar anak-anak tersebut ditangkap. Anak-anak tersebut ditangkap dan disiksa dengan berlebihan sehingga membuat rakyat sangat marah kepada rezim.

Demonstrasi terus terjadi mendengar penangkapan ke 15 remaja beberapa waktu yang lalu. Pada tanggal 16 Maret 2011, pergolakan mulai pecah setelah 35 orang ditahan karena menggelar protes yang diberi nama “Day of Dignity” di Damaskus. Para demonstran menuntut pembebasan para tahanan politik. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2011, demonstrasi juga meledak di Deraa, sebuah kota di dekat perbatasan Yordania. Dalam aksi yang diberi nama “Day of Dignity” ini, para demonstran menyerukan tuntutan agar para petinggi mengakhiri korupsi dan meminta pembebasan ke 15 anak yang ditangkap sebelumnya. Mereka juga meminta agar pemerintah

---

<sup>6</sup> Trias Kuncahyono. *Op.Cit.*, hal 144

memberikan kebebasan politik pada rakyat. Aksi ini awalnya berjalan damai walaupun diikuti oleh begitu banyak demonstran dan berkeliling kota setelah sholat Jumat. Namun seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya, aksi ini justru disambut oleh pasukan keamanan dengan melepaskan tembakan yang menewaskan 4 orang. Tewasnya ke empat demonstran tersebut semakin membuat rakyat geram.<sup>7</sup> Pada hari berikutnya, aparat kembali menembaki pelayat di pemakaman korban tewas pada aksi demo sebelumnya.

Dua hari kemudian, massa kembali turun ke jalan. Mereka bergerak menuju kantor Partai Baath yang berkuasa di Suriah. Kantor partai menjadi sasaran amukan massa, demonstran menuntut pencabutan undang-undang darurat. Undang-undang yang memberikan kebebasan kepada aparat keamanan untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi seseorang tanpa adanya surat penangkapan. Dalam hitungan hari, kerusuhan di Deraa telah berputar di luar kendali pemerintah setempat. Pada tanggal 27 Maret 2011 Pasukan Suriah secara membabi buta menembaki ratusan demonstran yang meyerukan pencabutan undang-undang darurat yang menyebabkan 16 orang tewas pada hari itu.<sup>8</sup>

Pada akhir Maret, tentara dengan kendaraan lapis baja di bawah komando Maher Al-Assad diturunkan ke kerumunan para pengunjuk rasa. Puluhan orang tewas, ketika tank menembaki kawasan pemukiman dan pasukan menyerbu rumah serta menangkap warga yang dianggap demonstran. Rangkaian tindakan represif aparat justru itu gagal menghentikan kerusuhan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 247

<sup>8</sup> *Ibid*



di Deraa, namun justru memicu protes anti-pemerintah di kota-kota lain di Suriah, di antaranya Baniyas, Homs, Hama dan pinggiran kota Damaskus. Tentara kemudian mengepung mereka yang dianggap sebagai penyebab kerusuhan.

Pergolakan politik di Suriah telah berlangsung sekitar dua tahun serta menimbulkan berbagai macam konflik dan perang saudara diantara sesama warga Suriah, dan diantara pihak oposisi Suriah dengan pihak militer dan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al-Assad. Serangkaian tindakan kekerasan fisik maupun mental juga terjadi di Suriah dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, mulai dari pembunuhan, pengeboman, penculikan, penembakan, pemerkosaan, penyiksaan dan lain sebagainya.

Aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Suriah terhadap pemerintah dan sekutunya pun sangat beragam, mulai dari perlawanan secara individu maupun kelompok. Namun sering kali pertempuran dimenangkan oleh pasukan pemerintah Suriah. Hal ini disebabkan karena perlawanan rakyat Suriah cenderung masih bersifat individual dan tidak terorganisir dengan baik secara strategi dan operasi militernya. Berdasarkan hal tersebut, rakyat Suriahpun sepakat untuk membentuk suatu kekuatan oposisi yang mampu menandingi pasukan tentara Suriah. Oleh karena itu pada tanggal 29 Juli 2011 dalam sebuah video yang dirilis di internet oleh sekelompok desertir berseragam dari militer Suriah yang membelot dan para kelompok-kelompok pemberontak kecil serta penduduk sipil yang turut mengangkat senjata bergabung dalam suatu organisasi yang dibentuk bersama oleh mereka

dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau Free Syrian Army (FSA). Free Syrian Army (FSA) adalah struktur oposisi utama bersenjata yang beroperasi di Suriah yang telah aktif selama perang saudara di Suriah yang terdiri dari para personel angkatan bersenjata Suriah yang membelot dan relawan. Tentara Pembebasan Suriah (FSA) tidak memiliki tujuan politik kecuali untuk melengserkan Bashar al-Assad sebagai Presiden Suriah.<sup>9</sup> Yang kemudian kelompok ini bekerjasama dengan Syrian National Council pada bulan Desember 2011 untuk menjatuhkan rezim Al-Assad.<sup>10</sup>

Namun di tengah-tengah situasi sosial politik yang terus memburuk di Suriah, Presiden Bashar Al-Assad ternyata masih dapat mempertahankan rezim kekuasaannya karena dukungan dari pihak militer dan aparat birokrasi pemerintah yang masih loyal dan cukup kuat.

Selama terjadi pergolakan politik, sebuah organisasi pengawas HAM menyatakan bahwa jumlah korban tewas sejak awal pemberontakan, Maret 2011, berjumlah 110.437 orang meliputi 40.146 orang warga sipil yang terdiri dari hampir 4.000 orang perempuan dan lebih dari 5.800 anak-anak. Lembaga itu juga merilis laporan mengenai tewasnya 21.850 orang pejuang pemberontak, 27.654 tentara Suriah, 17.824 milisi pro rezim Assad dan 171 anggota Hizbullah, Syi'ah Lebanon, serta 2.726 korban tewas tanpa identitas.<sup>11</sup> Sementara menurut laporan PBB, selama berlangsungnya revolusi,

---

<sup>9</sup> [http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2011/me\\_syria0973\\_08\\_03.asp](http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2011/me_syria0973_08_03.asp). Diakses pada 25 Februari 2015

<sup>10</sup> <http://articles.latimes.com/2011/dec/01/world/la-fg-syria-accord-20111202>. Diakses pada 25 Februari 2015

<sup>11</sup> <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/opini/49759/m-ibrahim-hamdani-krisis-politik-suriah-dalam-tinjauan-geopolitik-rusia>. Diakses pada 26 Februari 2015

korban jiwa telah mencapai 8.000 orang. Lebih dari 3000 ribu penduduk mengungsi ke negara-negara tetangga, seperti Turki, Lebanon, dan Yordania.<sup>12</sup> Mereka memilih meninggalkan tanah air mereka, sementara warga yang bertahan harus beradaptasi dengan teror, desing peluru, darah, ledakan bom, penculikan, pembunuhan dan kekejian lainnya.

Situasi keamanan Suriah yang semakin memburuk dan telah menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan itu kemudian disoroti oleh dunia internasional, bahkan oleh Negara-negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan Suriah seperti Russia, China, dan Iran juga mulai menekan pemerintah Suriah untuk tidak bertindak represif dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya sendiri. Di lain pihak, dunia internasional juga terus berikhtiar untuk mengupayakan perdamaian atau meminimalisir gencatan senjata diantara faksi- faksi yang berkonflik di Suriah, dan antara pihak oposisi dengan pihak pemerintah yang dilindungi oleh militer. Mantan Sekretaris Jenderal PBB yang kini bertugas sebagai Utusan Khusus PBB untuk Liga Arab, Kofi Annan, Senin tiba di Doha, Qatar, untuk bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Hamed bin Khalifa al-Thani, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar, Sheikh Hamd bin Jasim al-Thani. Dalam pertemuan tersebut, Kofi Annan menjelaskan bahwa pembicaraannya dengan Presiden Assad terfokus pada penghentian aksi kekerasan, perizinan untuk akses bantuan kemanusiaan, dan membuka dialog politik. Namun ia juga mengakui

---

<sup>12</sup>*Berebut Kepentingan di Suriah, Loc. Cit.*

bahwa misinya belum meraih kemajuan untuk mengakhiri krisis Suriah dalam dua kali pertemuan dengan Presiden Assad di Damaskus. Upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan fisik yang terjadi di Suriah oleh pihak-pihak internasional, khususnya PBB dan Liga Arab, tampaknya masih menghadapi jalan terjal dan panjang akibat belum dicapainya kesepakatan damai atau gencatan senjata antara pihak pemerintah yang didukung militer dengan faksi-faksi oposisi bersenjata Suriah. Apalagi diduga kuat bahwa terdapat kelompok-kelompok teroris, ekstrimis, dan radikal yang ikut mengambil peran dalam kerusuhan dan bentrokan di Suriah dalam kurun waktu setahun ini.

Namun upaya-upaya Liga Arab (khususnya Qatar) dan PBB (Kofi Annan) untuk secara serius berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik di Suriah patut didukung dan disukseskan oleh semua pihak. Rezim Suriah selalu menegaskan bahwa mereka tidak menghadapi kubu oposisi, tetapi sekelompok teroris yang sedang membuat kacau negara. Rezim ini juga curiga bahwa aksi protes di Suriah didalangi oleh pihak Barat. Sedangkan Dewan Nasional Suriah (Suriah National Council/ SNC) telah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera menggelar sidang dengan tujuan membahas pembantaian yang menewaskan 60 orang di kota Homs oleh pasukan Pemerintah Suriah. Bentrok senjata juga terjadi antara pasukan pemerintah dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA), pasukan oposisi, juga mulai menjalar ke Damaskus. Akibatnya sejumlah 80 korban tewas

ditemukan di kota Idlib, 60 jenazah yang sebagian terdiri dari perempuan dan anak-anak juga ditemukan di Distrik Al-Adawiyah di kota Homs.

Perbedaan pendapat yang sangat tajam antara rezim Suriah di bawah pimpinan Presiden Bashar al-Assad dengan pihak oposisi yang tergabung dalam Dewan Nasional Suriah/SNC telah menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah Suriah sepanjang abad ke 21 ini. Tuntutan mundur dari pihak oposisi kepada Presiden Assad pun hingga saat ini masih belum dapat dipenuhi akibat masih kuatnya dukungan pihak militer dan birokrasi terhadap rezim Assad. Dengan dalih menumpas kelompok teroris, pihak militer pun bertindak represif dan keras terhadap faksi-faksi oposisi Suriah. Sementara pertempuran terus berlangsung antara pihak pemerintah dan kubu oposisi, rakyat Suriah yang tidak berdosa dan tidak mengerti persoalan justru banyak yang menjadi korban, baik yang mengungsi ke luar negeri maupun yang tewas akibat perang tersebut.

## **B. Campur Tangan Dunia Internasional Dalam Konflik Suriah**

Intervensi adalah turut campurnya suatu negara secara diktator dalam kaitannya dengan negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu. Terdapat berbagai macam intervensi yang salah satunya adalah intervensi militer, intervensi ini dapat dilakukan oleh suatu negara ataupun organisasi.

Bentuk intervensi militer adalah mengirimkan tentara dalam jumlah besar yang dilakukan untuk menjaga stabilitas rezim yang berkuasa terhadap tindakan pemberontak atau membantu pemberontak dalam menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.<sup>13</sup> Ada beberapa bentuk intervensi meliputi aksi tunggal dari pemerintah individu, koalisi khusus yang berkepentingan, operasi dana PBB, untuk menjaga perdamaian regional atau pasukan perdamaian yang dipimpin oleh organisasi keamanan regional.<sup>14</sup>

### **1. Respon Internasional Terhadap Konflik Suriah**

Konflik internal yang terjadi di Suriah mendapat sorotan dari dunia internasional termasuk Barat dan juga oposisinya, yang kemudian pihak-pihak ini berusaha campur tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, berdasarkan sejarah dan kebijakan luar negerinya di Semenanjung Arab menginginkan Suriah yang demokratis dengan menggulingkan rezim Assad. Namun, lain dengan pihak oposisinya yaitu Rusia dan China yang juga memainkan politik yang sesuai dengan kepentingannya.

Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi pada Februari 2012 sebagai bentuk dari upaya penyelesaian konflik yang dicanangkan oleh Liga Arab mengenai penggabungan pasukan pemelihara perdamaian Arab-PBB. Resolusi yang mengarah pada upaya perdamaian ini

---

<sup>13</sup> KJ. Holsti. 1983. *International Politic* terjemahan. M. Tahrir Azhary. *Politik Internasional untuk Analisis*

<sup>14</sup> Marbun, 2003. *Kamus Politik*, hal 233

berisikan tentang tuntutan kepada pemerintahan Suriah agar segera menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban.<sup>15</sup>

Lain halnya dengan Amerika dan negara-negara Barat yang lain, Rusia justru secara nyata menawarkan bantuan untuk menghadapi desakan dan campur tangan internasional dalam penyelesaian krisis domestik di Suriah. Negara ini memilih untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah Bashar untuk menghentikan aksi demonstrasi. Sehingga, dengan tegas Rusia menolak segala bentuk sanksi yang dapat memberatkan Suriah dalam hal ini, termasuk sanksi ekonomi dan politik. Dewan Keamanan PBB menyepakati untuk mengaplikasikan Chapter 7 Article 41 UN Charter maka jalan intervensi militer akan terbuka bagi Suriah.<sup>16</sup> Namun, bersama dengan Rusia, China juga sepakat untuk membebaskan Suriah dari jalan intervensi militer Dewan Keamanan. Sehingga, sebanyak tiga kali veto dijatuhkan untuk Suriah.

Dengan ditolaknya Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Krisis Suriah, maka hal itu berarti AS tidak dapat melakukan tindakan militer dan harus mengganti strateginya dengan cara non-militer di Suriah. Maka, AS mulai memberikan bantuan dana terhadap oposisi sebagai bentuk dukungannya untuk menjatuhkan rezim Assad.

---

<sup>15</sup> United Nation Security Council, 2011, *Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria's Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China*, United Nation Official Site, 04 Oktober 2011, New York

<sup>16</sup> *Ibid*

## 2. Bantuan Militer Rusia Kepada Rezim Al Assad

Di tengah gencarnya protes dan kecaman dunia internasional khususnya Amerika Serikat dan sekutunya terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad, Rusia justru hadir untuk membantuk pihak pemerintahan dengan terus mengirimkan senjata kepada rezim tersebut untuk menindak para oposisi. Pihak Barat yang mencoba untuk menyelesaikan konflik melalui strategi mereka kini menghadapi tantangan yang secara signifikan lebih besar jika tetap berusaha terlibat dalam konflik Suriah, baik secara politik dan militer dari pada yang mereka lakukan di Libya. Tidak seperti presiden Muammar khadafi, Presiden Bashar al-Assad meningkatkan kemampuan angkatan udara dan lautnya sejak pemberontakan terhadapnya muncul tahun 2011. Bahkan Assad semakin mengokohkan militernya dengan bantuan Rusia.

Pada November 2011, Rusia mengirim konvoi kapal perang, termasuk kapal induk Admiral Kuznetsov beserta satu kapal patroli, kapal antikapal selam, dan beberapa kapal perang lainnya ke pangkalan militer Rusia di Tartus, kota pelabuhan terbesar kedua di Suriah.<sup>17</sup> Keberadaan Rusia untuk memperkuat pertahanan maritim, yang sangat berguna untuk mencegah potensi konflik di negara strategis tersebut. Kapal perang Rusia yang dikirim ke perairan Suriah terdiri dari tiga kapal induk, kapal pengangkut pesawat dan rudal penjelajah.<sup>18</sup> Para pejabat militer Rusia mengatakan penempatan kapal-

---

<sup>17</sup> *Rusia Kirim Kapal Induk ke Suriah*, 28 november 2011, <http://internasional.kompas.com/read/2011/11/28/21404576/Rusia.Kirim.Kapal.Induk.ke.Suriah>. Diakses pada 25 Februari 2015

<sup>18</sup> Trias Kunchayono, *Op. Cit.*, hal 47



kapal itu tidak berhubungan dengan krisis yang tengah terjadi di kawasan, namun bagian dari rencana yang sudah dipersiapkan lebih dari setahun lalu.<sup>19</sup>

Armada perang yang dikirimkan Rusia adalah sejumlah kapal perang canggih yaitu kapal induk utama yang dapat memuat beberapa jet tempur dan beberapa kapal penghancur yang berukuran lebih kecil. Jenis armada laut lainnya yang juga dikirim oleh negara tersebut adalah kapal perang dengan rudal balistik yang dapat dikendalikan dalam jarak jauh untuk menghancurkan beberapa target tepat yang digunakan oleh pemberontak sebagai markas militernya.

Pelabuhan Tartus merupakan pelabuhan utama yang digunakan oleh Rusia sebagai basis bersandarnya kapal-kapal perang negara tersebut. Kapal perang lain yang ditempatkan Rusia adalah kapal pengangkut marinir. Kapal-kapal tersebut akan memudahkan pemindahan personal marinir Suriah ke beberapa titik tempat yang menjadi pusat perlawanan oleh pihak pemberontak. Kapal lain yang juga dikirim oleh Rusia dalam konflik ini adalah jenis kapal penghancur. Kapal ini beroperasi untuk menghancurkan pangkalan militer pemberontak. Kapal ini bertugas untuk menghancurkan sistem persenjataan pemberontak yang digunakan untuk menyerang pemerintah Suriah. Pemerintah Rusia juga mengirimkan sejumlah pasukan militer ke negara tersebut. Pemerintah Rusia mengirimkan pasukan militer darat yang ditempatkan di beberapa titik di wilayah Suriah. Pasukan ini

---

<sup>19</sup> <http://vovworld.vn/id-id/Berita/Rusia-mengirim-kapal-perang-ke-Suriah-untuk-menjamin-keamanan/90854.vov>. Diakses pada 25 Februari 2015

ditempatkan untuk membantu militer Suriah mengatasi serangan pemberontakan dan warga suriah yang kontra terhadap pemerintah Bashar.<sup>20</sup>

Pasukan militer Rusia akan melakukan kerjasama dengan militer Suriah, mereka melakukan penjagaan dan patroli militer untuk menanggulangi aksi anarkis yang dilakukan oleh pemberontak dan para pendukungnya. Selain melakukan patroli keberadaan pasukan militer Rusia juga membantu Suriah dengan melakukan pelatihan militer bersama. Pasukan militer Rusia memberikan pengajaran mengenai penggunaan sistem persenjataan yang dikirim Rusia ke negara tersebut. Pelatihan ini dilakukan oleh Rusia karena keterbelakangan militer Rusia mengenai sistem persenjataan internasional.<sup>21</sup> .

Selain pengiriman pasukan angkatan darat, Rusia juga mengirimkan sejumlah pasukan angkatan lautnya melalui kapal-kapal perang yang ditempatkan dipelabuhan dan wilayah perairan Suriah. Angkatan laut Rusia disiagakan untuk menanggulangi serangan militer yang berasal dari kapal perang negara lain yang memberikan dukungan terhadap kelompok pemberontak.

Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2012, sebuah kapal kargo Rusia yang berisikan senjata berlabuh di Limassol, Sirprus. Menurut beberapa

---

<sup>20</sup> <http://www.arahmah.com/read/2013/01/07/25969-dukung-rezim-suriah-yang-hampir-jatuh-rusia-kirim-62-ribu-tentara-dengan-71-kapal-perang.html>. Diakses pada 25 Februari 2015

<sup>21</sup> <https://indocropcircles.wordpress.com/2013/08/28/krisis-suriah-awal-perang-dunia-ke-iii/>. Diakses pada 25 Februari 2015

perkiraan, 10% dari penjualan senjata global Rusia pergi ke Suriah, dengan kontrak saat ini diperkirakan bernilai \$ 1,5 miliar.<sup>22</sup>

Selain amunisi, penjualan baru-baru ini telah termasuk pesawat latihan militer, sistem pertahanan udara dan senjata anti-tank.<sup>23</sup> Rusia mengirimkan sejumlah rudal yang dapat dikendalikan jarak jauh, negara ini juga mengirimkan Senjata-senjata anti-udara termasuk Buk-M2 dan Pantsyr-S1 (SA-22) yang bisa dipindah-pindahkan. Rusia juga mengirim ke Suriah rudal antipesawat termmodern tahun lalu, termasuk sekitar 40 rudal SA-17 Grizzly dan dua rudal jarak menengah SA-17 Buk, menurut SIPRI. Dan meskipun kemarahan dunia atas tindakan keras Assad, Suriah mengumumkan kesepakatan US\$ 550 juta dengan Rusia pada Januari untuk 36 kali latihan ringan dan pesawat tempur yang disebut Yak-130.<sup>24</sup> Jenis senjata lain yang juga diberikan Rusia adalah jenis senjata api yang memiliki amunisi dengan kekuatan besar. Rusia pun mengirimkan sistem radar pada Suriah untuk mendeteksi serangan-serangan yang mungkin terjadi.<sup>25</sup> Senjata-senjata tersebut diberikan kepada tentara militer Suriah terutama kepada tentara yang berada digaris depan dekat dengan pemukiman warga yang menjadi markas pemberontak.<sup>26</sup>

Pada tahun 2012, Rusia juga mengirimkan 3 kapal perang amfibi ke wilayah perairan Suriah. Kapal-kapal perang ini berisi ratusan personel

---

<sup>22</sup> <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16797818>. Diakses pada 27 Februari 2015

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/20/115391351/Mengapa-Suriah-Tak-Bisa-Di-Libya-kan>. Diakses pada 25 Februari 2015

<sup>25</sup> <http://www.theguardian.com/world/2012/dec/23/syria-crisis-russian-military-presence>. Diakses pada 27 Februari 2015

<sup>26</sup> Ibrahim Noor, *Intervensi Rusia Dalam Konflik Suriah*, Universitas Mulawarman, ejournal, 2014

angkatan laut Rusia yang akan melakukan latihan militer bersama tentara Suriah. Latihan militer gabungan tersebut digelar di perairan Mediterania. Selain itu, kapal perang Rusia akan transit di Tartus untuk mengambil stok logistik makanan segar dan air. Pengiriman kapal perang tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi warga negara Rusia yang ada di Suriah.<sup>27</sup>

Salah satu bukti keberadaan pasukan Rusia di Suriah adalah, pada tanggal 9 Juni, sebuah bus yang membawa tentara Rusia diserang. Serangan tersebut diakui oleh pihak Rusia sendiri dan mengakui bahwa serangan itu bukanlah yang pertama kalinya yang menargetkan pasukan Rusia di Suriah.

Rusia terus mendukung rezim Assad dengan kuat dan membantah kejahatan yang dilakukan oleh pasukan dan milis-milisi pro-Assad terhadap rakyatnya. Rusia mengumumkan secara resmi memiliki Armada Mediterania yang bertanggung jawab di seluruh wilayah Laut Mediterania. Pengerahan itu merupakan langkah yang dikatakan Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk melindungi keamanan Rusia. Namun, pengerahan tersebut dilakukan saat Moskow sedang berhadapan dengan Barat dalam masalah Suriah. Dari Eropa Tengah, Laut Mediterania merupakan akses sangat penting menuju Timur Tengah dari sisi barat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <http://news.detik.com/read/2012/08/03/172636/1982779/1148/rusia-kirim-kapal-perang-ke-wilayah-suriyah?nd771104bcj>. Diakses pada 25 Maret 2015

<sup>28</sup> *Rusia Kirim Kapal Induk ke Suriah, Loc. Cit.*